

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi cukup besar di bidang ekonomi. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia hingga saat ini. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenkopUKM), UMKM memiliki kontribusi yang besar dalam perekonomian Indonesia dimana memiliki jumlah lebih dari 64,2 juta unit usaha, menyumbang 61,9% pada Produk Domestik Bruto (PDB) dan mampu menyerap 97% terhadap tenaga kerja. Namun demikian, UMKM di Indonesia menghadapi berbagai tantangan seperti akses pembiayaan, pemasaran, dan daya saing serta produktivitas (Kemenko Perekonomian, 2023). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan fondasi perekonomian kerakyatan yang dapat menopang perekonomian Negara Indonesia (Hertati et al., 2021). Hasil produk dari UMKM sudah ada yang mampu dan layak untuk mengisi pasar internasional dan tentunya akan berbanding lurus dengan peningkatan penerimaan domestik bruto bagi negara.

Di Indonesia sendiri UMKM menempati jumlah mayoritas dari total unit usaha yang ada. Akan tetapi kebanyakan dari para pengusaha UMKM masih mengalami kesulitan dalam menjalankan usaha, dan secara garis besar kesulitan yang dihadapi berkisar masalah permodalan, persaingan

pasar, dan bahan baku yang sulit didapat. Permodalan nampaknya menjadi alasan klasik yang menghadang perkembangan UMKM, bahkan keterbatasan modal dapat menjadi faktor penyebab kegagalan usaha. Menurut data dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), pada 2020 terdapat sekitar 46,6 juta dari total 64 juta UMKM di Indonesia belum memiliki akses permodalan dari perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank (Kemenko Perekonomian,2022). Oleh karena itu, negara sudah sepatutnya membantu dan memfasilitasi UMKM agar dapat digunakan sebagai pilar penopang bagi pertumbuhan ekonomi yang berkepanjangan, pengurangan jumlah pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebutuhan finansial bagi UMKM perlu diperhatikan oleh pemerintah dan rendahnya produktivitas UMKM seringkali disebabkan faktor finansial.

UMKM memerlukan pendanaan modal yang dapat diperoleh dari pemberian kredit pada bank dan lembaga keuangan bukan bank. Namun, kebanyakan dari pelaku UMKM kesulitan dalam perolehan kredit usaha dari pihak perbankan atau lembaga keuangan lainnya sebagai modal usaha bagi mereka. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan untuk mendapatkan informasi tentang tata cara mendapatkan dana dan keterbatasan kemampuan untuk mendapatkan dana. Banyak kendala yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia sehingga mereka tidak mampu bertahan lama dikarenakan kesulitan dalam persaingan bisnis dan juga ada UMKM yang stagnan tidak bisa mengembangkan usahanya.

Permasalahan umum yang sering dihadapi oleh UMKM tersebut didukung oleh pernyataan dari Kepala Eksekutif Pengawas Industri Non-Bank bahwa ketersediaan modal merupakan permasalahan yang sudah sangat lama bagi perekonomian Indonesia khususnya pada pelaku UMKM (Yuniar, 2021). Di sisi lain, nilai kredit yang disalurkan UMKM di Indonesia terhadap PDB nasional sebesar 7%, terbilang rendah apabila dibandingkan dengan kinerja negara tetangga yang melampaui 15%. Selain itu, porsi kredit UMKM terhadap total kredit perbankan di Indonesia berkisar di 20%, masih di bawah target arahan Presiden RI sebesar 30% di 2024 (Siaran Pers - Bank Indonesia, 2023). Hal ini tentunya tidak sebanding dengan kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia dan permasalahan ini nantinya harus dapat menjadi perhatian pemerintah agar dapat meningkatkan penyaluran kredit perbankan kepada pelaku UMKM sehingga dapat memicu semakin besarnya peranan UMKM pada PDB (Abdilla, 2021).

Pasca pandemi Covid-19 juga telah mempengaruhi kinerja ekonomi global dan Indonesia. Dampak Covid-19 tidak hanya dirasakan oleh sektor rumah tangga dan kaum perempuan tetapi juga pada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Berdasarkan hasil survei *United Nation Development Program* (UNDP) bekerja sama dengan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) terkait dampak Covid-19 terhadap rumah tangga di Indonesia menunjukkan bahwa UMKM menjadi salah satu sektor yang sangat terpengaruh pandemi

Covid-19 yang ditunjukkan dengan 77% responden mengalami penurunan pendapatan dimana hampir 35% responden UMKM mengalami penurunan pendapatan selama pandemi di kisaran 40%-60% (OJK, Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2021-2025). Kondisi saat ini turut menguji ketahanan keuangan (*financial resilience*) berbagai sektor terutama pada sektor UMKM. Ketahanan keuangan merupakan kemampuan untuk mengatasi dampak guncangan ekonomi. Riset *Asian Development Bank (ADB) Institute* berjudul *Building Financial Resilience Through Financial and Digital Literacy in South Asia and Sub Saharian Africa* mengatakan bahwa untuk membangun ketahanan keuangan dimulai dengan literasi keuangan yang baik. Literasi keuangan seseorang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku keuangan dan inklusi keuangan yang pada akhirnya dapat meningkatkan ketahanan keuangan dalam menghadapi guncangan ekonomi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Dalam menjalankan suatu usaha, seseorang harus memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang keuangan untuk mengelola keuangan secara efektif, karena itu literasi keuangan sangat penting bagi setiap pengusaha. Banyak penelitian yang mengatakan bahwa kemampuan seseorang dalam mengenali dan mengakses lembaga keuangan akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan perusahaannya (Aribawa, 2016). Menurut G20, Literasi keuangan adalah keterampilan penting untuk memberdayakan masyarakat, terutama masyarakat rentan dan kurang terlayani, termasuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM),

serta untuk mendukung kesejahteraan, inklusi keuangan, serta perlindungan konsumen. Inklusi keuangan adalah ketersediaan akses bagi masyarakat untuk memanfaatkan produk dan/atau layanan jasa keuangan di lembaga jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan (OJK, 2022).

Tabel 1. 1 Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2019 dan 2022

Perbandingan Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2019 dan 2022

Indeks	2019	2022
Literasi	38,03%	49,68%
Inklusi	76,19%	85,10%
Gap	38,16%	35,42%

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, Siaran Pers - Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022

Hasil Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022 menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 49,68 persen, naik dibanding tahun 2019 yang hanya 38,03 persen. Sementara indeks inklusi keuangan tahun ini mencapai 85,10 persen meningkat dibanding periode SNLIK sebelumnya di tahun 2019 yaitu 76,19 persen. Hal tersebut menunjukkan gap antara tingkat literasi dan tingkat inklusi semakin menurun, dari 38,16 persen di tahun 2019 menjadi 35,42 persen di tahun 2022. Dari pemaparan data tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat gap yang cukup jauh antara literasi keuangan dengan inklusi keuangan, Indeks literasi keuangan (49,68%) dan inklusi keuangan (85,10%), artinya dari setiap 100 orang terdapat sekitar 85 orang yang inklusif namun hanya

sekitar 49 orang *yang well literate*. Tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia masih tergolong rendah sedangkan untuk inklusi keuangan atau tingkat akses produk dan layanan keuangan sudah cukup baik. Dapat dikatakan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia sudah mempunyai akses produk dan layanan keuangan tetapi masih kurang memahami manfaat dan risiko dari produk dan layanan keuangan tersebut.

Dalam memutuskan pengambilan kredit tentunya seorang individu perlu untuk mempertimbangkan risiko dan manfaat dari keputusan keuangan yang akan diambil, seseorang yang mempunyai tingkat literasi keuangan yang baik tentunya akan dapat mempertimbangkan keputusan melalui kalkulasi ekonomi, dimana modal dari utang tersebut dapat digunakan secara baik dan maksimal tetapi tetap memperkecil adanya risiko gagal bayar. Namun, masyarakat Indonesia secara umum belum memahami dengan baik karakteristik berbagai produk dan layanan jasa keuangan yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan formal, padahal literasi keuangan merupakan keterampilan yang penting dalam rangka pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan individu, perlindungan konsumen, dan peningkatan inklusi keuangan. Sehingga kurangnya pengetahuan tentang produk, layanan jasa keuangan dan cara untuk dapat meminjam pada perbankan atau lembaga keuangan menjadi salah satu hambatan pelaku UMKM dalam mencari pinjaman modal. Persepsi pemilik UMKM dalam memilih pendanaan kreditnya harus didasarkan pada pengetahuan yang dimiliki terhadap prosedur pemberian kredit, jaminan

yang dibutuhkan dalam pinjaman kredit, bunga dalam pemberian, promosi yang dilakukan dan kualitas pelayanan yang ada. Dan pemerintah harus memperhatikan tumbuh kembangnya lapangan usaha, karena pemerintah harus memberikan kontribusi yang nyata untuk UMKM.

Persaingan bisnis di bidang perbankan maupun lembaga keuangan lainnya yang nampak akhir-akhir ini adalah persaingan dalam penyaluran kredit usaha, khususnya dalam pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) karena Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berperan penting dalam memajukan perekonomian negara. Penyaluran kredit di Indonesia berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, penyaluran kredit memang menjadi utama dan menjadi kegiatan utama pada bank umum sebagai lembaga intermediasi keuangan untuk memberikan pinjaman kepada pihak yang kekurangan dana, baik pada aktivitas produktif (kredit modal kerja dan investasi) ataupun aktivitas yang sifatnya konsumtif bagi masyarakat (kredit konsumsi).

Penyaluran kredit bagi perbankan merupakan bisnis utama bank yang memberikan keuntungan berupa bunga, sebagai imbalan atas dana yang telah dipinjamkan kepada masyarakat (Adnan, Ridwan, & Fildzah, 2016). Pinjaman bank atau kredit juga secara khusus adalah aset terbesar dan menjadikan sumber pendapatan bank (Malede, 2014). Sektor perbankan Indonesia merupakan kunci dalam sistem keuangan negara dan ekonomi dimana perekonomian Indonesia juga dapat berkembang dengan adanya kredit sektoral perbankan, Otoritas Jasa Keuangan menyatakan

bahwa kredit memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi walaupun dengan tingkatan yang berbeda secara regional.

Berdasarkan data (Statistik Sistem Keuangan Indonesia Bank Indonesia, 2023) Pertumbuhan kredit UMKM di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut ini :

Tabel 1. 2 Pertumbuhan Kredit UMKM Indonesia tahun 2018 - 2022

Tahun	Pertumbuhan (% , yoy)
2018	11,36 %
2019	12,92 %
2020	-1,81 % (yoy)
2021	12,11 % (yoy)
2022	10,45 % (yoy)

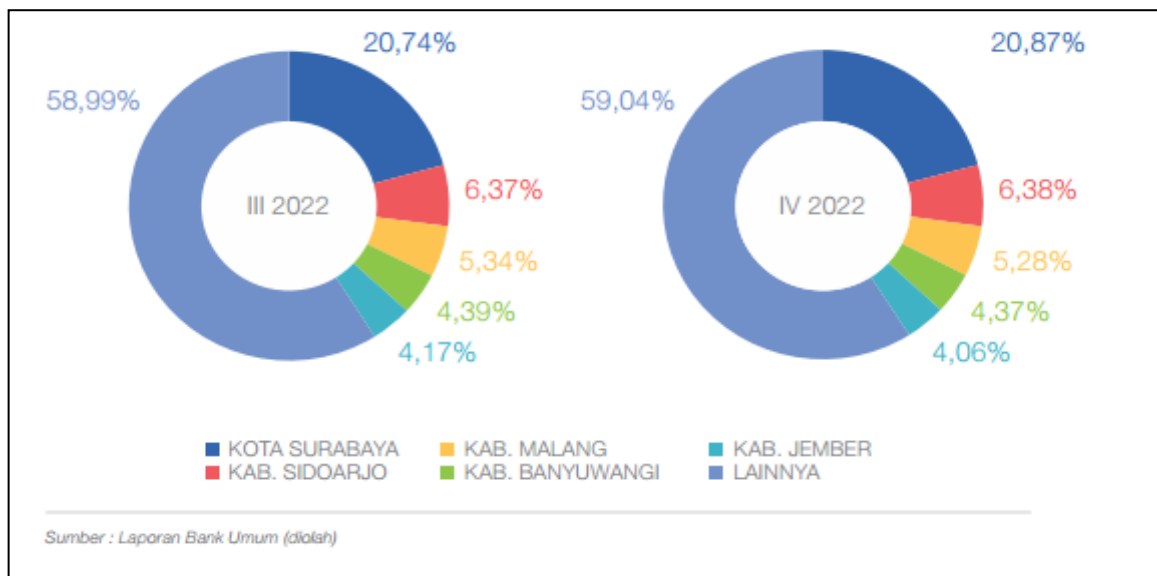
Sumber : (Bank Indonesia, SSKI_Juni_2023)

Dapat dilihat bahwa pertumbuhan kredit UMKM Indonesia selama tahun 2018-2022 mengalami kondisi fluktuatif. Persentase pertumbuhan terbesar terjadi pada tahun 2019 (12,92 %). Sedangkan, persentase pertumbuhan kredit UMUM di tahun 2020 saat pandemi virus corona Covid-19 memukul pertumbuhan kredit UMKM, sehingga anjlok dan tumbuh negatif 1,18%. Pada tahun 2021 pertumbuhan kredit UMKM kembali meningkat 12,11%. Dan pada tahun 2022 tercatat pertumbuhan kredit UMKM kembali menurun. Sehingga, dapat dikatakan pertumbuhan kredit di segmen UMKM masih tergolong rendah. Hal ini diperjelas juga berdasarkan

artikel yang berjudul “Penyaluran Kredit UMKM Terus Dipacu”. Artikel tersebut menjelaskan bahwa porsi penyaluran kredit perbankan ke sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM sekitar 20% masih di bawah target yang ditetapkan pemerintah, yakni 30 persen pada 2024. Hal ini disebabkan oleh persoalan agunan dan minimnya laporan keuangan UMKM menjadi kendala terhambatnya penyaluran kredit ke segmen ini (Yogatama,2023). Data (Tinjauan Kebijakan Moneter Bank Indonesia, tahun 2023) menunjukkan juga bahwa di segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pertumbuhan kredit tercatat sebesar 6,83% (yoy) pada April 2023, setelah pada bulan sebelumnya masih bisa tumbuh 8,5% (yoy). Dan Adapun, salah satu hal yang masih bisa menopang pertumbuhan tersebut adalah penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp 53,93 triliun. Bank Indonesia akan terus mendorong intermediasi perbankan guna menjaga momentum pemulihan ekonomi.

Di Negara berkembang ini, UMKM telah mampu berkontribusi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Saputri & Fasa, 2021). Akses Keuangan kepada UMKM di Provinsi Jawa Timur perlu adanya dukungan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Untuk mendukung adanya upaya tersebut, diperlukan pemberdayaan sektor UMKM yang berkontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Berdasarkan data dari Bank Indonesia yang di keluarkan bulan Februari 2023 mengenai Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Timur bahwa pertumbuhan penyaluran kredit kepada UMKM di Provinsi Jawa

Timur tercatat melambat pada triwulan IV 2022. Kredit UMKM tumbuh sebesar 10,72% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 22,42% (yoy).



Gambar 1. 1 Proporsi Penyaluran Kredit UMKM Terbesar di Kabupaten/Kota di Jawa Timur

Secara spasial, kredit UMKM terbesar masih terkonsentrasi di Kota Surabaya. Penyaluran kredit terutama di lakukan di 3 kabupaten/kota, yaitu Kota Surabaya dengan pangsa 20,87%, Kabupaten Sidoarjo dengan pangsa 6,38%, dan Kabupaten Malang dengan pangsa 5,28%. Tingginya penyaluran kredit pada daerah tersebut sejalan dengan banyaknya usaha di Ibukota dan pusat pariwisata Jawa Timur yang berlokasi di 3 daerah tersebut. Adapun kinerja penyaluran kredit UMKM di daerah lain tidak sebesar 3 daerah tersebut atau bisa dikatakan porsi penyaluran kredit di daerah lain masih rendah salah satunya di Kabupaten Jombang.

Kabupaten Jombang merupakan suatu daerah yang berperan penting untuk meningkatkan pertumbuhan UMKM. Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam mengembangkan UMKM di Kabupaten Jombang bisa membantu meningkatkan peluang agar sektor ekonomi dan masyarakatnya tetap maju. Peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk kemajuan suatu negara/daerah. Maka, dibutuhkan strategi dalam mengembangkan UMKM dengan cara menciptakan lapangan usaha, memberikan bantuan permodalan, perlindungan usaha milik masyarakat, membuat pelatihan bagi para pelaku usaha, membentuk lembaga khusus, membantu mempromosikan hasil produknya, menjalin kerjasama dengan beberapa pihak untuk melancarkan promosi dan penjualan di Kabupaten Jombang.

Berdasarkan data Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Jombang, jumlah UMKM pada tahun 2022 di Kabupaten Jombang sebanyak 9.061 (Dinkop, 2022). UMKM sudah menunjukkan perannya terhadap perekonomian nasional maupun perekonomian di Kabupaten Jombang, Namun, UMKM juga masih menghadapi hambatan, kendala, serta keadaan-keadaan, baik internal ataupun eksternal, seperti: permodalan, produksi, pemasaran, sumber daya manusia, teknologi, iklim usaha, serta sebagainya. Banyaknya jumlah UMKM serta hambatan, kendala keadaan yang sedang terjadi dapat berdampak terhadap keberlanjutan usaha UMKM.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang telah melakukan evaluasi hasil dari pengembangan dan pembinaan Koperasi,

UMKM di Kabupaten Jombang masih ditemukan permasalahan yang masih belum tuntas yakni pertama, kualitas sumber daya manusia yang masih banyak kurang menguasai wawasan tentang kewirausahaan yang luas dan modern khususnya pada manajemen dalam meningkatkan kualitas produknya serta proses pengembangan usahanya sehingga masih perlu bantuan dan fasilitas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang yang berupa pelatihan teknis maupun manajemen. Kedua, permodalan yang masih kurang dirasakan oleh para pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya, sehingga suntikan dana baik melalui perbankan maupun bantuan pemerintah yang masih diharapkan oleh para pelaku usaha dan sedikitnya informasi permodalan yang diterima para pelaku usaha. Ketiga, pemasaran masih menjadi sebuah permasalahan jaringan pemasaran produk yang masih terbatas dan bergantung pada kualitas produk yang dihasilkan oleh sumber daya manusia. (Maghfiroh & Rahmawati, 2021).

Jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Jombang meningkat setiap tahunnya, sehingga semakin meningkat pula persaingan antar UMKM. Mau tidak mau pelaku UMKM tersebut harus banyak berinovasi agar dapat tetap bersaing dalam penjualan produk. Salah satu faktor yang sangat penting dalam meningkatkan produktifitas UMKM yaitu tidak lepas dari adanya biaya tambahan. Para pelaku UMKM harus bisa dan mengerti terobosan-terobosan yang ada bagaimana bisa mendapatkan tambahan biaya untuk perkembangan UMKM yang dimiliki, salah satunya yaitu pengambilan kredit

di bank atau lembaga keuangan non bank. Aktivitas bisnis merupakan fenomena yang sangat diperlukan bagi pengusaha dalam golongan kecil dan menengah sangat memerlukan bantuan keuangan dengan cara kredit untuk mengembangkan kegiatan usahanya.

Tabel 1. 3 Posisi Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Diberikan Bank Umum menurut Skala Usaha berdasarkan Lokasi Proyek di Kabupaten Jombang Tahun 2018 – 2022 (Juta Rupiah)

Tahun	Kriteria Usaha			
	Mikro	Kecil	Menengah	Total
2018	1.534.385	1.178.810	823.323	3.536.518
2019	1.713.631	1.154.726	988.125	3.856.482
2020	1.484.232	1.308.206	1.195.018	3.987.456
2021	2.327.220	1.733.691	731.358	4.792.270
2022	2.988.607	1.817.036	648.922	5.454.566

Sumber : Kabupaten Jombang Dalam Angka 2023_Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang

Berdasarkan tabel 1.3, dapat dilihat bahwa total posisi kredit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang di berikan bank umum menurut jenis usaha pada tahun 2022 di Kabupaten Jombang terus meningkat dan didominasi oleh kriteria usaha mikro.

Tabel 1. 4 Pertumbuhan Posisi Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Diberikan Bank Umum menurut Skala Usaha di Kabupaten Jombang Tahun 2018 – 2022

Tahun	Kredit	Pertumbuhan
2018	1.534.385	0
2019	1.713.631	11%
2020	1.484.232	-13%
2021	2.327.220	56%
2022	2.988.607	28%

Sumber : Kabupaten Jombang Dalam Angka 2023_Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang

Berdasarkan tabel 1.4, dapat dilihat bahwa posisi kredit skala usaha mikro di Kabupaten Jombang mengalami fluktuasi (kenaikan dan penurunan). Jika dilihat, pada persentase pertumbuhan posisi kredit usaha mikro di tahun 2020 saat pandemi virus corona Covid-19 juga memukul pertumbuhan kredit UMKM, posisi kredit usaha mikro anjlok dan tumbuh negatif 13%. Persentase pertumbuhan terbesar terjadi pada tahun 2021 sebesar 56%. Namun, pada tahun 2022 menurun kembali sebesar 28%.

Permasalahan fasilitasi pembiayaan/kredit yang terjadi pada pelaku UMKM di Kabupaten Jombang, menurut kepala bidang mikro Dinas Koperasi Bapak Jawahirul Ulum mengatakan bahwa masih ada pelaku UMKM yang tidak mampu bertahan lama dikarenakan kesulitan dalam persaingan bisnis, tidak bisa manage risiko dan ada juga UMKM yang

stagnan tidak bisa mengembangkan usahanya serta penerimaan pendapatan usaha oleh UMKM yang tidak menentu setiap bulannya membuat para UMKM ragu dengan kemampuannya membayar beban kredit setiap bulannya. Pengelolaan keuangan bagi masyarakat atau seseorang dalam memenuhi kebutuhan yang semakin bertambah menjadi kunci utama agar mampu mengikuti situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Belum adanya pemerataan kesejahteraan dalam masyarakat menyebabkan tidak sedikit masyarakat dengan penghasilan menengah memerlukan sumber dana tambahan ataupun solusi alternatif untuk memenuhi kebutuhan dalam menunjang kegiatan operasionalnya. Diantara banyaknya pilihan alternatif bantuan keuangan yang ada salah satu yang menjadi pilihan terbanyak di masyarakat adalah memutuskan melakukan kredit, baik untuk permodalan maupun memenuhi kebutuhan sehari-hari. Semua itu, tetap ada solusi sebelum mengambil keputusan pengambilan kredit, ada beberapa hal yang harus dimengerti, karena hal ini sebagai dasar utama menentukan sikap atas keputusan pengambilan kredit.

Keputusan pengambilan kredit merupakan suatu proses pengambilan keputusan kredit dari beberapa alternatif yang ada setelah melalui beberapa tahapan proses dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Kuncoro dan Adithya (2010), keputusan seseorang dalam mengambil kredit merupakan pemilihan dari dua atau lebih alternatif pilihan keputusan pengambilan kredit, artinya bahwa seseorang dapat membuat keputusan dalam mengambil kredit serta dapat

mempunyai alternatif lainnya. Keputusan nasabah dalam mengambil kredit, sangat penting sebelum nasabah mengambil kredit pada bank atau lembaga keuangan non bank. Keputusan bermaksud agar tidak ada hambatan baik yang besar maupun yang kecil, sehingga perlu diambil suatu keputusan. Pada saat mengambil keputusan harus cermat dan sesuai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Banyak faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan ketika akan memutuskan untuk mengambil kredit.

Keputusan kredit yang diambil oleh nasabah tidak hanya dilihat dari faktor dalam perusahaan itu sendiri, namun dapat dipengaruhi oleh faktor lain. Faktor demografi seperti jenis kelamin, usia, dan pendapatan dapat mempengaruhi seseorang dalam melakukan pengambilan keputusan untuk melakukan kredit. Hal tersebut dapat mempengaruhi perilaku seseorang, termasuk dalam mengelola perilaku keuangannya. Dimana secara tidak langsung persepsi dan sikap individu cenderung memiliki perbedaan dengan adanya perbedaan jenis kelamin, usia dan pendapatan. Menurut Micrets Agustina Silaya (2022), Dalam pengambilan keputusan, individu seringkali tidak menyadari bahwa faktor psikologis yang ada pada masing-masing juga memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan. Terkadang perilaku seseorang dalam mengambil keputusan seperti pada masalah keuangan dilatar belakangi oleh faktor emosional dan kepercayaan diri atau pengaruh orang lain di sekitarnya yang mempengaruhi individu dalam mengambil keputusan.

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi keputusan pengambilan kredit adalah literasi keuangan. Literasi keuangan merupakan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Literasi keuangan memainkan peran yang sangat penting dalam pengambilan keputusan terkait kredit. Dengan memiliki tingkat literasi keuangan yang tinggi, individu lebih mungkin membuat keputusan pengambilan kredit yang bijaksana dan bertanggung jawab. Mereka dapat menganalisis biaya dan risiko yang terkait dengan kredit, mengevaluasi kemampuan mereka untuk membayar kredit secara tepat waktu, dan memilih jenis kredit yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi keuangan mereka.

Sebaliknya, kurangnya literasi keuangan dapat menyebabkan pengambilan kredit yang tidak cerdas, terlalu banyak hutang, atau kesulitan keuangan dalam jangka panjang. Mengungkapkan bahwa salah satu faktor penyebab kegagalan pelaku UMKM mengembangkan usahanya adalah karena kurangnya pemahaman pelaku UMKM tentang produk keuangan yang digunakan sehingga akhirnya terjebak dalam layanan keuangan ilegal. Literasi keuangan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk membuat keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab terkait dengan pengambilan kredit. Dengan memiliki literasi keuangan yang baik, individu dapat menghindari risiko keuangan yang tidak perlu dan

memanfaatkan kredit dengan cara yang positif untuk mencapai tujuan keuangan mereka.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aziz & Aryanti (2019) menunjukkan bahwa literasi keuangan dan keuangan inklusif berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan wirausaha baru Jawa Barat dalam menggunakan kredit. Di dukung hasil penelitian oleh Puspasari, Hakim & Kemalasari (2020); mempertegas bahwa pengaruh Literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pengambilan kredit petani jagung desa Jotang. Dalam penelitian ini semakin tinggi tingkat literasi keuangan petani, maka petani akan semakin tepat dalam menentukan pengambilan pada produk keuangan termasuk dengan sistem kredit dan resiko keuangannya. Namun, hasil penelitian lain oleh Rahmania dan Ningtyas (2022) bahwa literasi keuangan memiliki pengaruh yang positif tetapi tidak signifikan terhadap keputusan pengambilan kredit yang artinya apabila tingkat literasi keuangan semakin tinggi maka keputusan pengambilan kredit nya juga semakin baik tetapi tidak memiliki arti yang penting. Pendapat yang bertolak belakang juga dikemukakan oleh Puspita dan Isnalita (2019), diungkapkan bahwa *Financial Literacy* yang dimiliki tidak berpengaruh terhadap perilaku manajemen keuangan seseorang. Pendapat ini didukung oleh Sari dan Listiadi (2021), yang mengungkapkan bahwa perilaku manajemen keuangan tidak bergantung pada *Financial Literacy* seseorang, karena

tingginya literasi keuangan yang dimiliki tidak menjamin baiknya perilaku manajemen keuangan yang dimiliki.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi keputusan pengambilan kredit adalah persepsi risiko. Menurut Jusuf (2018) persepsi risiko merupakan suatu pertimbangan utama pada tahap mengambil keputusan pembelian yang akan dilakukan. *Perceived Risk* (Persepsi Risiko) Zulfa & Hidayati (2018) mendefinisikan bahwa persepsi risiko sebagai sebuah ketidakpastian yang dihadapi konsumen ketika mereka tidak dapat meramalkan konsekuensi di masa yang akan datang akibat keputusan pembelian yang dilakukan. Persepsi risiko dapat dikategorikan sebagai faktor internal dalam pengambilan kredit. Ini karena persepsi risiko didasarkan pada persepsi, penilaian, dan pemahaman individu terhadap risiko yang terkait dengan pengambilan kredit. Ini melibatkan faktor-faktor internal yang terkait dengan persepsi dan penilaian individu, seperti tingkat kepercayaan, pemahaman tentang risiko, penilaian keuangan pribadi, dan pengalaman sebelumnya. Penting untuk memahami bahwa persepsi risiko dapat bervariasi dari individu ke individu. Faktor-faktor personal seperti toleransi risiko, pendapatan, kewajiban keuangan, dan pandangan terhadap keuangan pribadi dapat mempengaruhi bagaimana seseorang mempersepsikan dan mengevaluasi risiko dalam konteks pengambilan kredit.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Irjayanti (2017) menunjukkan bahwa persepsi risiko berpengaruh terhadap keputusan

investasi, sedangkan literasi keuangan, representativeness dan familiarity tidak berpengaruh terhadap keputusan investasi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yolanda & Tasman (2020) menunjukkan bahwa persepsi risiko dan literasi keuangan berpengaruh terhadap keputusan investasi. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian menurut Apriliani (2017) yang menyatakan bahwa *Perceived of risk* tidak berpengaruh terhadap keputusan pengambilan kredit. Pelaku UMKM tidak memedulikan risiko karena lebih mementingkan kelangsungan hidup usahanya.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi keputusan pengambilan kredit adalah *self efficacy*. Menurut Bandura (2006) *self-efficacy* merupakan keyakinan atau persepsi seseorang terhadap kemampuan yang dimilikinya untuk melaksanakan perilaku yang diperlukan dalam mencapai hasil kinerja tertentu. *Self-efficacy* merupakan penilaian diri seseorang apakah akan melakukan tindakan yang tepat atau salah, baik atau buruk, bisa atau tidak, dalam mengerjakan sesuatu ataupun menghadapi situasi tertentu. Berbeda dengan aspirasi (cita-cita). Seperti yang disampaikan Sina (2013:183) bahwa “efikasi keuangan atau *self efficacy* dapat meningkatkan cara individu dalam mengelola keuangan sehingga dapat mencapai kepuasan keuangan”. Dalam menentukan keputusan pengambilan kredit tentunya banyak indikator pendukung, salah satunya adalah bagaimana seseorang atau individu mempunyai kemampuan dan tingkat yakin pada saat mengambil keputusan kredit. Dalam konteks pengambilan kredit, *self-*

efficacy mencerminkan keyakinan individu terhadap kemampuannya untuk mengelola kewajiban keuangan dan membayar kembali pinjaman. Keyakinan ini merupakan aspek internal yang mempengaruhi keputusan dan tindakan individu dalam mengambil kredit.

Beberapa hasil penelitian terdahulu, Liu dan Zhang (2021) dalam penelitiannya membuktikan bahwa individu dengan rasa efikasi keuangan diri yang lebih tinggi cenderung memperkirakan peluang dan tantangan secara lebih rasional. Di dukung penelitian oleh Wardani, et.al (2022) menyatakan bahwa ada pengaruh *self efficacy* terhadap Perilaku Manajemen Keuangan pada pelaku UMKM. Pramedi dan Asandimitra (2021) menunjukkan bahwa *self efficacy* memiliki pengaruh terhadap perilaku manajemen keuangan dimana dengan memiliki *self efficacy* yang tinggi maka individu semakin bertanggung jawab terhadap pilihan serta risiko yang menjadi keputusannya. Kontradiksi hasil penelitian diungkapkan oleh Ismail et al. (2017) diungkapkan bahwa *self efficacy* tidak berpengaruh dalam perilaku mengelola keuangan. Hasil penelitian ini diperkuat oleh Purnamasari (2018) yang membuktikan bahwa *self efficacy* yang diwujudkan dengan kepercayaan diri tidak mempengaruhi pengambilan keputusan keuangan. Dalam penelitian Sari dan Anam (2021) diperoleh bahwa sikap keuangan dan *self-efficacy* berpengaruh signifikan positif terhadap perilaku keuangan. Dimana salah satu perilaku keuangan ialah kredit.

Selain variabel faktor literasi keuangan, persepsi risiko, dan *self efficacy* terdapat variabel *intervening* (mediasi) yang digunakan dalam penelitian ini adalah inklusi keuangan. SNLKI (2017) mendefinisikan inklusi keuangan sebagai akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan yang bermanfaat dan terjangkau dalam memenuhi kebutuhan masyarakat maupun usahanya dalam hal ini transaksi, pembayaran, tabungan kredit dan asuransi yang digunakan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Inklusi keuangan memainkan peran penting dalam pengambilan kredit karena dapat mempengaruhi ketersediaan dan aksesibilitas kredit bagi individu. Jika seseorang tidak memiliki akses yang memadai ke layanan keuangan, termasuk lembaga keuangan yang menawarkan kredit, mereka mungkin mengalami kesulitan dalam memperoleh kredit yang mereka butuhkan. Inklusi keuangan yang baik mencakup aspek-aspek seperti akses terhadap lembaga keuangan, kebijakan yang mendukung keterjangkauan kredit, kesetaraan akses untuk semua segmen masyarakat, serta pendekatan yang inklusif dalam menyediakan produk dan layanan keuangan. Inklusi keuangan yang kuat dapat membantu individu yang sebelumnya tidak memiliki akses terhadap kredit untuk mendapatkan pembiayaan yang dibutuhkan untuk tujuan mereka. Inklusi keuangan berkontribusi pada perkembangan UMKM. Salah satunya adalah akses ke modal. UMKM sering menghadapi tantangan dalam memperoleh modal yang cukup untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka. Inklusi keuangan melalui layanan

perbankan dan lembaga keuangan non-bank dapat memberikan akses ke pinjaman, kredit mikro, dan modal usaha lainnya yang dibutuhkan oleh UMKM.

Hal ini di dukung penelitian yang dilakukan oleh Rahmania dan Ningtyas (2022) menyatakan bahwa inklusi keuangan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan pengambilan kredit, dimana semakin tinggi tingkat akses produk jasa dan layanan keuangan maka akan semakin baik pula dalam memutuskan pengambilan utang. Dari hasil temuan penelitian dari Mwangi dan Cheluget (2018) menyimpulkan bahwa literasi keuangan, inovasi keuangan dan inklusi keuangan berpengaruh signifikan terhadap akses kredit UKM.

Keputusan kredit yang diambil oleh pelaku UMKM dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi faktor pribadi dan faktor psikologi. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor sosial, faktor kebudayaan dan faktor dari perusahaan (kualitas pelayanan dan prosedur kredit). Faktor-faktor yang berbeda pada setiap lembaga keuangan inilah yang membuat peneliti tertarik dari sisi faktor internal. Dalam pengambilan keputusan kredit tentunya ada pula pengaruh yang ditimbulkan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sejauh mana pengaruh yang timbul dari pinjaman kredit, Karena tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat pengaruh yang muncul baik dari sisi negatif maupun positif.

Berdasarkan pemaparan fenomena gap, research gap, dukungan teori beberapa ahli, hasil penelitian terdahulu dan kondisi keputusan pengambilan kredit UMKM yang menjadi latar belakang penelitian ini, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian yang mengarah pada fenomena keputusan pengambilan kredit yang dirasa perlu digali lebih dalam akan faktor-faktor yang berpotensi mempengaruhi hal tersebut.

Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Literasi Keuangan, Persepsi Risiko, Dan *Self Efficacy* Terhadap Keputusan Pengambilan Kredit Dengan Inklusi Keuangan Sebagai Variabel Intervening Pada Pelaku UMKM Di Kabupaten Jombang”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada permasalahan yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Literasi Keuangan berpengaruh terhadap keputusan pengambilan kredit pada pelaku UMKM di Kabupaten Jombang ?
2. Apakah Persepsi Risiko berpengaruh terhadap keputusan pengambilan kredit pada pelaku UMKM di Kabupaten Jombang ?
3. Apakah *Self Efficacy* berpengaruh terhadap keputusan pengambilan kredit pada pelaku UMKM di Kabupaten Jombang ?
4. Apakah Literasi Keuangan berpengaruh terhadap Keputusan Pengambilan Kredit Melalui Inklusi Keuangan pada pelaku UMKM di Kabupaten Jombang ?

5. Apakah Persepsi Risiko berpengaruh terhadap Keputusan Pengambilan Kredit Melalui Inkusi Keuangan pada pelaku UMKM di Kabupaten Jombang ?
6. Apakah *Self Efficacy* berpengaruh terhadap Keputusan Pengambilan Kredit Melalui Inkusi Keuangan pada pelaku UMKM di Kabupaten Jombang ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Literasi Keuangan terhadap Keputusan Pengambilan Kredit pada pelaku UMKM di Kabupaten Jombang
2. Untuk mengetahui pengaruh Persepsi Risiko terhadap Keputusan Pengambilan Kredit pada pelaku UMKM di Kabupaten Jombang
3. Untuk mengetahui pengaruh *Self Efficacy* terhadap Keputusan Pengambilan Kredit pada pelaku UMKM di Kabupaten Jombang
4. Untuk mengetahui pengaruh Literasi Keuangan terhadap Keputusan Pengambilan Kredit Melalui Inklusi Keuangan pada pelaku UMKM di Kabupaten Jombang
5. Untuk mengetahui pengaruh Persepsi Risiko terhadap Keputusan Pengambilan Kredit Melalui Inklusi Keuangan pada pelaku UMKM di Kabupaten Jombang

6. Untuk mengetahui pengaruh *Self Efficacy* terhadap Keputusan Pengambilan Kredit Melalui Inklusi Keuangan pada pelaku UMKM di Kabupaten Jombang

1.4. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini akan memberikan beberapa manfaat sebagai berikut :

1. Bagi penulis

Dari penelitian ini, diharapkan penulis dapat menambah wawasan, pengetahuan, serta informasi atau gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pengambilan kredit pelaku UMKM.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Dari penelitian ini, diharapkan sebagai referensi serta bahan kajian bagi peneliti lain yang akan mengembangkan dan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai keputusan pengambilan kredit.

3. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Dari penelitian ini, diharapkan sebagai bahan referensi untuk menambah informasi dan bahan bacaan sehingga dapat digunakan sebagai dasar penelitian selanjutnya serta menambah pengetahuan untuk mahasiswa lain agar bermanfaat di masa yang akan datang.